



### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow priority program*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan dengan melihat kinerja keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

#### a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber, yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah sebagai upaya penggerak roda pembangunan. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah disebutkan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu 2011 – 2016 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada



intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberana sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.1**  
**Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Jembrana 2011 – 2015**

No	Uraian	TAHUN					Rata-Rata pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	41.330.605.674,41	46.470.110.900,58	68.485.482.416,06	89.349.644.542,62	98.112.674.981,55	25,00
<b>1.1.1</b>	Pajak daerah	9.000.786.813,25	11.043.396.183,00	22.069.529.710,50	30.111.096.040,75	32.861.157.268,97	42,03
<b>1.1.2</b>	Retribusi daerah	4.521.869.727,33	6.750.577.625,00	7.905.025.746,40	8.836.894.861,00	8.929.995.048,00	19,79
<b>1.1.3</b>	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.602.468.852,94	2.853.010.557,29	3.937.071.653,32	4.912.891.848,84	4.912.891.848,84	18,24
<b>1.1.4</b>	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	25.205.480.280,89	25.823.126.535,29	34.573.855.305,84	45.461.094.962,92	51.408.630.815,74	20,19
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>426,572,101,884.00</b>	<b>464,324,549,206.00</b>	<b>517,834,703,075.00</b>	<b>546,799,186,839.00</b>	<b>577,461,799,183.00</b>	<b>7,89</b>
<b>1.2.1</b>	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21,668,027,144.00	27,391,860,206.00	21,511,707,075.00	17,840,081,937.00	15,688,309,183.00	(6,05)
<b>1.2.2</b>	Dana alokasi umum (DAU)	339,501,986,000.00	396,762,339,000.00	450,919,726,000.00	484,825,804,000.00	486,895,030,000.00	9,62
<b>1.2.3</b>	Dana alokasi khusus (DAK)	35,488,400,000.00	40,170,350,000.00	45,403,270,000.00	43,546,330,000.00	74,878,460,000.00	23,52
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	100,358,626,965.28	140,603,643,928.36	159,014,797,020.78	176,819,268,738.02	<b>228,127,824,369.38</b>	<b>23,35</b>
<b>1.3.1</b>	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1.3.2.</b>	Dana Darurat						
<b>1.3.3</b>	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	66,498,751,965.28	79,964,812,535.16	86,699,592,888.78	114,153,615,885.64	131,798,589,369.38	18,95
<b>1.3.4</b>	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32,073,035,000.00	51,680,144,000.00	70,517,727,000.00	70,899,963,000.00	83,094,188,000.00	28,83
<b>1.3.5</b>	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,786,840,000.00	8,958,687,393.20	1,797,477,132.00	2,150,000,000.00	825,000,000.00	69,85
<b>1.3.6</b>	Dana Alokasi Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	12.410.047.000,00	100
	<b>Total Pendapatan</b>	568,261,334,523.69	651,398,304,034.94	745,334,982,511.84	823,352,410,267.26	903,702,298,533.93	12,32

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana 2015



## **b. Belanja Daerah**

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 – 2014 dikelompokkan menjadi:

- 1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga.
- 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Jembrana yang sejahtera sesuai visi, misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2011 – 2015 sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2011 – 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	Belanja tidak langsung	358,144,523,233.36	394,837,893,831.72	416,035,004,401.80	441,901,507,649.90	506,733,927,976.27	9,15
1.1	Belanja pegawai	305,653,577,706.00	335,950,649,834.00	353,148,285,728.00	376,791,590,797.00	397,650,713,627.00	5,87
1.2	Belanja subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	Belanja hibah	14,192,868,500.00	23,593,700,000.00	14,529,650,000.00	16,157,500,000.00	39,120,669,817.00	1,38
1.4	Belanja bantuan sosial	15,236,445,658.00	60,000,000.00	3,109,037,500.00	2,984,518,500.00	225,333,000.00	-1,02
1.5	Belanja bagi hasil	5,039,983,790.39	7,888,318,627.82	8,528,288,039.07	8,558,125,020.84	13,099,593,982.51	0,50
1.5	Belanja bantuan keuangan	17,790,812,746.97	27,259,197,619.90	36,700,120,713.87	37,409,773,332.06	56,636,018,306.76	2,43
1.6	Belanja tidak terduga	230,834,832.00	86,027,750.00	19,622,420.86	0,00	1,599,243.00	0,02
2	Belanja Langsung	188,703,952,191.40	269,885,165,852.90	302,503,439,127.25	344,383,790,960.33	378,979,284,700.46	12,33
2.1	Belanja pegawai	7,688,909,737.00	28,006,611,681.00	33,198,531,995.00	26,392,135,900.00	31,514,726,600.00	1,65
2.2	Belanja barang dan jasa	113,521,518,558.40	107,264,780,137.90	126,741,441,106.25	156,133,945,809.33	161,438,568,738.16	2,94
2.3	Belanja modal	67,493,523,896.00	134,613,774,034.00	142,563,466,026.00	161,857,709,251.00	186,025,989,362.30	3,74
	<b>TOTAL</b>	<b>546,848,475,424.76</b>	<b>664,723,059,684.62</b>	<b>718,538,443,529.05</b>	<b>786,285,298,610.23</b>	<b>885,713,212,676.73</b>	<b>21,49</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana 2015



### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah yang disebut dengan surplus atau defisit anggaran.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja, peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan atau penerimaan piutang daerah.



**Tabel 3.3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2 pertumbuhan
<b>A</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>21,421,859,098.93</b>	<b>13,324,755,649.68</b>	<b>26,796,538,982.79</b>	<b>37,067,111,657.03</b>	<b>17,989,085,857.20</b>	<b>0.12</b>
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>60,871,080,232.74</b>	<b>82,588,745,031.67</b>	<b>66,467,447,206.99</b>	<b>90,665,655,189.78</b>	<b>124,437,900,246.81</b>	<b>0.22</b>
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	55,871,080,232.74	77,283,939,331.67	61,063,989,381.99	84,863,986,189.78	119,332,766,846.81	0,24
1.2	Penerimaan piutang daerah	-	304,805,700.00	203,457,825.00	601,669,000.00	105,133,400.00	-0,20
1.3	Penerimaan Dana Talangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,000,000,000.00	0
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>8,200,000,000.00</b>	<b>8,400,000,000.00</b>	<b>8,400,000,000.00</b>	<b>8,550,000,000.00</b>	
2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/BUMD	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,550,000,000.00	7,78
2.2	Jaminan Kredit Daerah	-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0,25
2.3	Dana Talangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,000,000,000.00	-0,21
<b>B</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO (1-2)</b>	<b>55,871,080,232.74</b>	<b>74,388,745,031.67</b>	<b>58,067,447,206.99</b>	<b>82,265,655,189.78</b>	<b>115,887,900,246.01</b>	<b>0,23</b>
<b>C</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (A+B)</b>	<b>77,283,939,331.67</b>	<b>61,063,989,381.99</b>	<b>84,863,986,189.78</b>	<b>119,332,766,846.81</b>	<b>133,876,968,104.01</b>	<b>0.17</b>

Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana 2015

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam upaya terwujudnya *good governance* dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan publik.

**a. Belanja Kebutuhan Aparatur**

Untuk dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Jember Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>302,615,018,927.00</b>	<b>335,599,578,196.00</b>	<b>354,511,625,136.00</b>	<b>375,788,726,951.00</b>	<b>396,284,620,772.00</b>
1.	Gaji dan Tunjangan	225,426,338,727.00	239,652,683,177.00	249,234,350,366.00	257,418,346,951.00	274,570,607,472.00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	74,846,080,200.00	94,095,040,170.00	101,253,274,770.00	116,274,380,000.00	119,470,383,300.00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,807,800,000.00	1,812,000,000.00	2,012,000,000.00	2,096,000,000.00	2,243,630,000.00
4.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	534,495,256.00	39,854,849.00	-	-	-
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>85,973,444,546.00</b>	<b>157,070,703,454.00</b>	<b>169,645,782,340.00</b>	<b>192,262,788,263.00</b>	<b>217,408,091,490.30</b>
1.	Belanja Honorarium PNS	2,314,218,000.00	1,277,025,000.00	2,704,320,000.00	2,397,780,000.00	2,800,375,000.00
2.	Belanja Uang Lembur PNS	857,049,400.00	969,827,000.00	1,009,664,200.00	944,180,000.00	1,114,847,000.00
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	105,000,000.00	-	-
4.	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	820,750,000.00	1,126,242,500.00	984,370,000.00	1,473,155,000.00	903,437,000.00
5.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	180,000,000.00	250,000,000.00	175,000,000.00	-
6.	Belanja makan dan minuman pegawai	17,440,000.00	-	-	-	-
7.	Belanja pakaian dinas dan atributnya	202,863,750.00	270,622,950.00	448,258,200.00	1,278,337,620.00	389,900,000.00
8.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	696,852,000.00	1,792,084,600.00	2,248,783,242.00	1,761,358,450.00	2,254,341,300.00
9.	Belanja Perjalanan Dinas	13,570,747,500.00	16,841,127,370.00	19,331,920,672.00	22,542,267,942.00	23,919,201,828.00
10.	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
11.	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12.	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Moubelier, Peralatan dan Perlengkapan dll)	67,493,523,896.00	134,613,774,034.00	142,563,466,026.00	161,857,709,251.00	186,025,989,362.00
	<b>T O T A L (A+B)</b>	<b>388,588,463,473.00</b>	<b>492,670,381,650.00</b>	<b>524,157,407,476.00</b>	<b>566,058,515,214.00</b>	<b>613,692,712,262.30</b>

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab.Jember





Dari tabel 3.4 tersebut diatas maka akan dilakukan analisa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5(lima) tahun yang dapat disampaikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015**

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase $\frac{3}{4} \times 100\%$
1	2	3	4	5
1	2011	388,588,463,473.00	551,848,475,424.76	70,4
2	2012	492,670,381,650.00	672,923,059,684.00	73,2
3	2013	524,157,407,476.00	729,938,443,529.05	71,8
4	2014	566,058,515,214.00	794,685,298,610.23	71,2
5	2015	613,692,712,262.30	894,263,212,676.73	68,6

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana 2015

Berdasarkan hasil analisis proporsi total belanja untuk kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun yang lalu tercermin bahwa proporsi belanja pemenuhan aparatur secara umum mengalami penurunan terhadap total pengeluaran. Persentase yang semakin besar menunjukkan bahwa proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur masih lebih besar dibandingkan dengan total pengeluaran. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jembrana belum sepenuhnya menerapkan efisiensi anggaran yang tersedia. Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah dari proporsi belanja pemenuhan aparatur dengan total belanja disebabkan oleh total pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah.

#### **b. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib



dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan, belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

**Tabel 3.6**  
**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2015**

	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>325,214,009,075.36</b>	<b>366,954,024,831.72</b>	<b>392,797,206,309.80</b>	<b>417,711,389,149.06</b>	<b>394,965,527,859.27</b>	<b>0.04</b>
1.	Gaji dan Tunjangan	225,426,338,727.00	239,652,683,177.00	249,234,350,366.00	257,418,346,951.00	274,570,607,472.00	5.06
2.	Tambahan Penghasilan PNS	74,846,080,200.00	94,095,040,170.00	101,253,274,770.00	116,274,380,000.00	119,470,383,300.00	
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,807,800,000.00	1,812,000,000.00	2,012,000,000.00	2,096,000,000.00	2,243,630,000.00	5.62
4.	Biaya Pungutan Pajak Daerah	534,495,256.00	39,854,849.00	-	-	-	0.00
5.	Jasa Pelayanan Medis	2,899,866,670.00	-	-	-	-	0.00
6.	Biaya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	138,996,853.00	351,071,638.00	-	1,002,863,846.00	1,366,092,855.00	36.22
7.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	5,039,983,790.39	7,888,318,627.82	8,528,288,039.07	8,558,125,020.00	13,099,593,982.51	29.51
8.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	13,699,607,853.57	18,836,500,000.00	25,958,632,499.96	26,116,900,000.00	40,880,231,999.97	1.31
9.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	590,004,893.40	590,004,893.40	515,612,182.80	600,157,772.70	503,584,793.10	-0.03
10.	Bantuan Keuangan Program JKBM	-	3,629,523,726.50	5,275,426,031.11	5,644,615,559.36	10,357,001,513.69	45.28
11.	Belanja tidak terduga	230,834,832.00	86,027,750.00	19,622,420.86	-	1,599,243.00	-79.97
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>56,087,517,749.60</b>	<b>38,739,615,799.00</b>	<b>47,772,596,098.00</b>	<b>34,287,337,326.00</b>	<b>33,571,355,167.00</b>	<b>-0.08</b>
1.	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-	-	-	0.00
2.	Uang jasa Pelayanan Kesehatan Dana BLUD	-	5,766,122,960.00	9,246,313,213.00	1,612,533,000.00	2,082,127,500.00	2.31
3.	Belanja Jasa Kantor	30,693,827,826.00	11,866,238,024.00	14,677,449,611.00	16,515,022,668.00	19,298,057,694.00	-2.07
4.	Belanja premi asuransi	-	1,731,278,700.00	1,951,855,559.00	350,831,000.00	177,006,725.00	-39.61



5.	Belanja Perawatan kendaraan bermotor	7,154,525,602.00	8,357,023,530.00	10,349,149,580.00	1,946,865,751.00	1,879,587,888.00	-11.00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	480,299,500.00	643,897,000.00	442,625,000.00	379,960,000.00	316,846,000.00	-6.99
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	647,862,500.00	695,756,900.00	1,353,919,200.00	1,610,826,669.00	1,653,921,766.00	30.91
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,077,220,200.00	4,849,187,000.00	4,501,952,000.00	1,945,465,000.00	2,179,670,000.00	-8.24
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	105,000,000.00	-	-	0.00
10.	Belanja pemeliharaan	-	4,830,111,685.00	5,144,331,935.00	9,925,833,238.00	5,984,137,594.00	19.91
11.	Belanja Perawatan Bangunan/Gedung	1,873,332,677.00	-	-	-	-	0.00
12.	Belanja Perawatan Peralatan	1,017,069,325.00	-	-	-	-	0.00
13.	Belanja perawatan jaringan/instalasi	1,666,269,797.00	-	-	-	-	0.00
14.	Belanja Barang Dana BOS	911,810,239.00	-	-	-	-	0.00
15.	Belanja Jaminan Sosial	7,565,300,083.60	-	-	-	-	0.00
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran Daerah</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>8,200,000,000.00</b>	<b>8,400,000,000.00</b>	<b>8,400,000,000.00</b>	<b>8,550,000,000.00</b>	<b>0.01</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	3,550,000,000.00	1.56
3.	Pengeluaran Dana Talangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,000,000,000.00	0.04
	A+B+C	<b>386,301,526,824.96</b>	<b>413,893,640,630.72</b>	<b>448,969,802,407.8</b>	<b>460,398,726,475.06</b>	<b>437,086,883,026.27</b>	<b>0.06</b>

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana

Dari tabel tersebut diatas disebutkan bahwa total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dan menganalisa kerangka pendanaan.



## c. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

**Tabel 3.7**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2016**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	568,261,334,523.69	651,398,304,034.94	745,334,982,511.84	823,352,410,267.26	903,702,298,533.93
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	546,848,475,424.76	664,723,059,684.62	718,538,443,529.05	786,285,298,610.23	885,713,212,676.73
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,000,000,000.00	8,200,000,000.00	8,400,000,000.00	8,400,000,000.00	8,550,000,000.00
<b>A</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>16,412,859,098.93</b>	<b>(21,524,755,649.68)</b>	<b>18,396,538,982.79</b>	<b>28,667,111,657.03</b>	<b>9,439,085,857.20</b>
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	55,871,080,232.74	77,283,939,331.57	61,063,989,381.99	84,863,986,189.78	119,332,766,846.81
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,000,000,000.00
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	304,805,700.00	203,457,825.00	601,669,000.00	105,133,400.00
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>60,871,080,232.74</b>	<b>82,588,745,031.57</b>	<b>66,467,447,206.99</b>	<b>90,665,655,189.78</b>	<b>129,350,792,095.65</b>
<b>(A+B)</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	<b>77,283,939,331.67</b>	<b>61,063,989,381.99</b>	<b>84,863,986,189.78</b>	<b>119,332,766,846.81</b>	<b>133,876,986,104.01</b>

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana

Selama kurun waktu 5(lima) tahun dari tahun 2011-2015 tercerminkan bahwa defisit anggaran terjadi pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 21.524.755.649,68 yang akan ditutupi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar Rp 61.063.989.381,99 atau 35,24% dari total silpa



pembiayaan. Secara umum bahwa peningkatan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran yang dialokasikan dan penetapan defisit anggaran berada pada batas aman dalam 5(lima) tahun berjalan.

**d. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Jemberana**

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		Rata Pertumbu han
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	55,871,080,232.74		77,283,939,331.67	100	61.063,989,381.99	100	84,863,986,189.78	100	119,332,766,846.81	100	
2	Pelampauan penerimaan PAD	-		5,082,985,600.84	6,5	-		4,338,534,187.85	5,1	-		
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-		-	-	-		-		-		
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-		3,521,797,466.88	4,55	-		-		-		
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-		68,679,156,263.95	88,8	61.063,989,381.99	100	80,525,452,001.93	94,8	119,332,766,846.81	100	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-		
7	Kegiatan lanjutan	-		-		-		-		-		

Sumber Data: Bagian Keuangan Setda Jemberana



e. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

**Tabel 3.9**  
**Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan**  
**Kabupaten Jemberana**

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	73,220,800,384.65	58,872,048,048.94	79,733,495,799.70	105,410,745,940.30	117,585,573,160.19
	Dikurangi :					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	77,283,939,331.67	61,067,225,381.99	84,863,986,189.78	119,332,766,846.81	133,836,686,294.01



f. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran**  
**Kabupaten Jembrana**

No	Uraian	Data tahun dasar	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo kas neraca daerah	117,585,573,160.19	10	129,344,130,476.21	142,278,543,523.82	156,506,397,876.23	172,157,037,663.83	189,372,741,430.22	208,310,015,573.24
	Dikurangi :								
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan								
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	133,836,686,294.01		147,220,354,923.41	161,942,390,415.75	178,136,629,457.33	195,950,292,403.06	215,545,321,643.37	237,099,853,807.70



g. Analisis Neraca Daerah

**Tabel 3.11**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015**

N o.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2 Pertum- buan
<b>1</b>	<b>Aset</b>						
<b>2</b>	<b>Aset Lancar</b>						
3	Kas Di Kas Daerah	73,220,800,384.65	58,872,048,048.94	79,733,495,799.70	105,410,745,940.30	117,585,573,160.19	14,90
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	379,423,008.77	0.00	0.00	6,986,645.00	0.00	(25)
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00	47,286,455.00	100
6	Kas Di BLU Puskesmas	198,329,466.49	879,436,692.17	1,289,881,069.11	4,292,437,957.21	5,500,861,347.54	162,76
7	Kas Di BLU RSU Negara	2,684,755,760.52	310,195,309.86	2,631,606,164.95	7,832,596,318.28	8,881,732,685.26	217,74
8	Kas Di Pengelolaan Dana Bergulir	800,630,711.24	1,005,545,331.02	1,209,003,156.02	1,810,672,156.02	1,915,805,556.02	25,35
9	Piutang Pajak	211,181,100.00	189,681,700.00	26,965,626,286.59	29,167,004,271.50	32,100,119,724.30	3531,07
10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.00	0.00	(4.049.037.733,34)	( 10.087.645.793,03)	( 75.860.821,08)	12,47
11	Piutang Retribusi	0.00	101,624,850.00	170,970,729.00	522,319,868.00	929,956,697.50	87,95
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	825,259,716.00	1,603,666,551.69	2,091,493,697.92	1,693,536,158.86	1,809,527,387.76	28,14
13	Piutang Lainnya	15,235,094,288.46	16,348,021,400.90	24,248,986,095.10	28,392,324,158.84	4,462,121,213.60	(2,89)
14	Persediaan	8,662,800,989.65	7,200,832,491.63	6,868,134,594.00	6,670,518,582.00	227,094,095.00	(30,24)
<b>15</b>	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>102,218,275,425.78</b>	<b>86,511,052,376.21</b>	<b>141,160,159,859.05</b>	<b>175,711,496,262.98</b>	<b>173,384,217,501.09</b>	<b>17,74</b>
16	Investasi Jangka Panjang						
17	Investasi Nonpermanen						
18	Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	20,767,808,227.10	20,767,808,227.10	20,767,808,227.10	20,767,808,227.10	7,523,780,364.10	(15,94)
19	Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(13,316,527,863.00)	(13,316,527,863.00)	(13,316,527,863.00)	( 13,244,027,863.00)	( 13,244,027,863.00)	(0,14)
20	Jumlah Investasi Nonpermanen	7,451,280,364.10	7,451,280,364.10	7,451,280,364.10	7,523,780,364.10	(5,720,247,498,90)	(43,76)
21	Investasi Permanen						
22	Penyertaan Modal Pada PT. Bank BPD Bali	8,092,000,000.00	11,092,000,000.00	14,092,000,000.00	17,092,000,000.00	20,092,000,000.00	25,74
23	Penyertaan Modal Pada Pt.Jamkrida Bali Mandara	0.00	200,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	800,000,000.00	70,83
24	Jumlah Investasi Permanen	8,092,000,000.00	11,292,000,000.00	14,492,000,000.00	17,692,000,000.00	20,892,000,000.00	27,01
<b>25</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>15,543,280,364.10</b>	<b>18,743,280,364.10</b>	<b>21,943,280,364.10</b>	<b>25,215,780,364.10</b>	<b>15,171,752,501.10</b>	<b>3,19</b>





26	Aset Tetap						
27	Tanah	193,857,204,000.00	195,183,704,000.00	195,449,637,000.00	194,665,342,000.00	195,026,349,000.00	0,15
28	Peralatan Dan Mesin	137,804,781,944.00	161,153,877,463.00	164,995,854,849.00	191,612,124,500.00	215,776,165,028.00	12,02
29	Gedung Dan Bangunan	430,761,797,035.00	467,109,120,028.00	535,368,306,652.00	587,248,713,011.00	644,318,637,364.00	10,61
30	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	293,524,708,912.00	342,278,928,098.00	395,940,974,906.00	478,077,178,256.00	580,522,996,117.30	18,62
31	Aset Tetap Lainnya	9,540,863,329.00	17,310,229,245.00	22,018,828,460.00	24,419,420,086.00	26,302,378,586.00	31,81
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	11,966,108,000.00	8,125,782,000.00	7,828,952,395.82	7,828,952,395.82	16,06
<b>33</b>	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1,065,489,355,220.00</b>	<b>1,195,001,966,834.00</b>	<b>1,321,899,383,867.00</b>	<b>1,483,851,730,248.82</b>	<b>1,669,775,478,491.12</b>	<b>11,89</b>
34	Dana Cadangan						
35	Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
36	Aset Lainnya						
37	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	71,207,500.00	6,932,500.00	6,932,500.00	6,932,500.00	0.00	(47,57)
38	Aset Tak Berwujud	0	4,246,272,500.00	6,861,898,250.00	33,262,182,650.00	33,262,182,650.00	136,58
39	Aset Lain-Lain	32,347,456,331.00	35,146,128,087.00	60,472,612,082.00	40,887,732,988.00	40,915,150,988.00	12,10
40	Jumlah Aset Lainnya	32,418,663,831.00	39,399,333,087.00	67,341,442,832.00	74,156,848,138.00	74,177,333,638.00	25,65
41	<b>Jumlah Aset</b>	<b>1,215,669,574,840.88</b>	<b>1,339,655,632,661.31</b>	<b>1,552,344,266,922.15</b>	<b>1,758,935,855,013.90</b>	<b>1,932,508,782,131.31</b>	<b>12,31</b>
42	Kewajiban						
43	Kewajiban Jangka Pendek						
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	376,918,034.00	955,877,588.01	2,023,730,035.15	714,779,691.00	0.00	25,16
46	Utang Bapel Jamsosda	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
<b>47</b>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>376,918,034.00</b>	<b>955,877,588.01</b>	<b>2,023,730,035.15</b>	<b>714,779,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,16</b>
48	Kewajiban Jangka Panjang						
<b>49</b>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>376,918,034.00</b>	<b>955,877,588.01</b>	<b>2,023,730,035.15</b>	<b>714,779,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,16</b>
51	Ekuitas Dana						
52	Ekuitas Dana Lancar						
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	77,283,939,331.67	61,067,225,381.99	84,863,986,189.78	119,332,766,846.81	133,836,686,294.01	17,69
54	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	3,236,000.00	0.00	20,672,170.00	47,286,455.00	57,19
55	Cadangan Piutang	16,271,535,104.46	18,242,994,502.59	49,428,039,075.27	49,687,538,664.17	39,225,864,202.08	40,63



56	Cadangan Persediaan	8,662,800,989.65	7,200,832,491.63	6,868,134,594.00	6,670,518,582.00	227,094,095.00	(30,24)
57	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Membayar Hutang Jangka Pendek	(341,643,034.00)	(347,771,708.70)	1,551,112,504.15	0.00	0.00	(161,06)
58	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Membayar Hutang Jangka Pendek Lainnya	(35,275,000.00)	(608,105,879.31)	( 472.617.531,00)	(714.779.691,00)	0.00	388,21
59	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>101,841,357,391.78</b>	<b>86,166,516,667.51</b>	<b>142,238,654,832.20</b>	<b>174,996,716,571.98</b>	<b>173,336,931,046.09</b>	<b>17,94</b>
60	Ekuitas Dana Investasi						
61	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	15,543,280,364.10	18,743,280,364.10	21,943,280,364.10	25,215,780,364.10	28,415,780,364.10	16,32
62	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,065,489,355,220.00	1,195,001,966,834.00	1,321,899,383,867.00	1,483,851,730,248.82	1,669,775,478,491.12	11,89
63	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	32,418,663,831.00	39,399,333,087.00	67,341,442,832.00	74,156,848,138.00	74,184,266,138.00	25,65
64	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>1,113,451,299,415.10</b>	<b>1,253,144,580,285.10</b>	<b>1,411,184,107,063.10</b>	<b>1,583,224,358,750.92</b>	<b>1,772,375,524,993.22</b>	<b>12,32</b>
65	Ekuitas Dana Cadangan						
66	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan						
67	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>1,215,292,656,806.88</b>	<b>1,339,311,096,952.61</b>	<b>1,553,422,761,895.30</b>	<b>1,758,221,075,322.90</b>	<b>1,945,712,456,039.31</b>	12,51
68	<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana</b>	<b>1,215,669,574,840.88</b>	<b>1,340,266,974,540.62</b>	<b>1,555,446,491,930.45</b>	<b>1,758,935,855,013.90</b>	<b>1,945,712,456,039.31</b>	(14,79)

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jemberana

Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas.

Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2011-2015 tersaji pada Tabel 3.12 berikut ini.



**Tabel 3.12**  
**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A.</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1.	Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	271,94	90,50	69,75	245,82	<b>48,15</b>
2.	Rasio quick ( <i>quick ratio</i> )	248,21	82,97	66,35	236,49	47,15
<b>B.</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
3.	Rasio total utang terhadap total aset	0,0003	0,0007	0,0013	0,00048	0,0036
4.	Rasio utang terhadap modal	0,0003	0,0007	0,0013	0,00041	0,0029

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember Tahun 2015

Berdasarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jember sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa rasio lancar selama 5 (lima) periode dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Jember mampu menjamin kewajiban yang jatuh tempo. Untuk tahun 2015 rasio likuiditasnya pada rasio lancar (*current ratio*) sebesar 48,15 yang berarti bahwa Rp 1,- utang lancar dijamin dengan aset lancar sebesar Rp 48,15. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sangat likuid. Sama seperti halnya rasio quick pada tahun 2015 sebesar 47,15, hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik setelah dikurangi nilai persediaan. Meskipun persediaan masuk dalam komponen aset lancar, persediaan di Pemerintah Daerah tidak dikategorikan sebagai barang dagangan, namun dalam perhitungan Quick Ratio persediaan tersebut digunakan sebagai pengurang aset lancar.

Rasio total utang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang atau seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva, di mana semakin besar ratio total utang terhadap total aktiva maka semakin besar pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada pihak lain. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2015 sebesar 0,0036 atau 0,36%, hal ini berarti aset Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh hutang kurang dari 1% atau sangat kecil.

Rasio utang terhadap modal menunjukkan besarnya modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bukan berasal dari pihak lain. Pada tahun 2015 rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Jember sebesar 0,0029 atau



0,29% . Hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Jemberana, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jemberana mengalami trend peningkatan rata-rata 10,93 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata-rata 0,12 %.

#### Proyeksi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jemberana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016–2021 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.13**  
**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Jemberana**  
**Tahun Anggaran 2016 – 2021**

No	Tahun	PAD (Juta Rp)
1	2016	88.244.044.682,84
2	2017	94.421.127.810,64
3	2018	101.030.606.757,38
4	2019	108.102.749.230,40
5	2020	115.669.941.676,53
6	2021	123.766.837.593,89

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jemberana 2015

Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 (lima) tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata–rata 7 %

**b. Dana Perimbangan**

Dari kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata-rata kontribusi 70% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.14 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jemberana Tahun Anggaran 2016–2021 sebagai berikut :



**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jemberana**  
**Tahun Anggaran 2016–2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dana Perimbangan</b>	716.423.706.000	750.170.060.100	785.707.473.465	823.120.311.980	862.497.419.179	903.932.327.158
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak	20.748.312.000	19.710.896.400	18.725.351.580	17.789.084.001	16.899.629.801	16.054.648.311
1.2	DAU	562.525.134.000	590.651.390.700	620.183.960.235	651.193.158.247	683.752.816.159	717.940.456.967
1.3	DAK	133.150.260.000	139.807.773.000	146.798.161.650	154.138.069.733	161.844.973.219	169.937.221.880
1.4	Dana Penyesuaian						

Sumber : *Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana 2015*

**c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain–lain pendapatan daerah yang sah selama 5 (lima) tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata–rata 23,35% dan memberi rata-rata kontribusi 30% dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain–lain pendapatan daerah yang sah untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016 – 2021 sebagai berikut :



**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2016 – 2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	250.936.034.252,32	263.482.835.964,94	276.656.977.763,18	290.489.826.651,34	305.014.317.983,91	320.265.033.883,10
1.1	Pendapatan Hibah						
1.2	Dana Darurat						
1.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	131.887.497.932,32	138.481.872.828,94	145.405.966.470,38	152.676.264.793,90	160.310.078.033,60	168.325.581.935,28
1.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.875.057.320,00	94.368.810.186,00	99.087.250.695,30	104.041.613.230,07	109.243.693.891,57	114.705.878.586,15
1.5	Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	1.310.000.000,00	1.375.500.000,00	1.441.000.000,00	1.509.775.000,00	1.581.825.000,00	1.657.313.750,00
1.6	Restitusi Pajak						

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana

#### d. Proyeksi Silpa

Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA periode tahun 2010-2014 sebesar 3,44 persen. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu



menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 6,00 persen dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16 berikut ini.

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)**  
**Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2016-2021**

No.	Uraian	Tahun dasar 2015	Tingkat pertum-buhan	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.099.634.041,30	(778.490.660,28)	42.321.143.381,02	41.897.931.947,21	41.478.952.627,74	41.064.163.101,46	40.653.521.470,45	40.246.986.255,74

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jemberana

**e. Proyeksi Belanja Daerah**

Analisis dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisa dilakukan dengan proyeksi 5(lima) tahun ke depan untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dalam melakukan perhitungan proyeksi belanja daerah perlu memperhatikan 3(tiga) yaitu:

1. Asumsi indikator ekonomi makro
2. Kebijakan Pembiayaan daerah
3. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja pendidikan





**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama**  
**Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016–2021**

No.	Uraian	Data tahun dasar (2015)	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>353,581,711,066.20</b>	<b>10%</b>	388,939,882,172.82	427,833,870,390.10	470,617,257,429.11	517,678,983,172.02	569,446,881,489.23	626,391,569,638.15
1.	Gaji dan Tunjangan	274,570,607,472.00	10%	302,027,668,219.20	332,230,435,041.12	365,453,478,545.23	401,998,826,399.76	442,198,709,039.73	486,418,579,943.70
2.	Tambahan penghasilan PNS	119,470,383,300.00	10%	131,417,421,630.00	144,559,163,793.00	159,015,080,172.30	174,916,588,189.53	192,408,247,008.48	211,649,071,709.33
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2,243,630,000.00	10%	2,467,993,000.00	2,714,792,300.00	2,986,271,530.00	3,284,898,683.00	3,613,388,551.30	3,974,727,406.43
4.	Biaya Pungutan Pajak	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jasa Pelayanan Medis	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Insentif pemungutan pajak daerah dan Retribusi Pajak	1,366,092,855.00	10%	1,502,702,140.50	1,652,972,354.55	1,818,269,590.01	2,000,096,549.01	2,200,106,203.91	2,420,116,824.30
7.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propensi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13,099,593,982.51	10%	14,409,553,380.76	15,850,508,718.84	17,435,559,590.72	19,179,115,549.79	21,097,027,104.77	23,206,729,815.25
8.	Bantuan Keuangan Program JKBM	10,357,001,513.69	10%	11,392,701,665.06	12,531,971,831.56	13,785,169,014.72	15,163,685,916.19	16,680,054,507.81	18,348,059,958.59
9.	Belanja Tidak Terduga	1,599,243.00	10%	1,759,167.30	1,935,084.03	2,128,592.43	2,341,451.68	2,575,596.84	2,833,156.53
			10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33,571,355,167.00</b>	<b>10%</b>	36,928,490,683.70	40,621,339,752.07	44,683,473,727.28	49,151,821,100.00	54,067,003,210.01	59,473,703,531.01
1.	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	medis								
2..	Uang jasa Pelayanan Kesehatan Dana BLUD	2,082,127,500.00	10%	2,290,340,250.00	2,519,374,275.00	2,771,311,702.50	3,048,442,872.75	3,353,287,160.03	3,688,615,876.03
3.	Belanja jasa kantor	19,298,057,694.00	10%	21,227,863,463.40	23,350,649,809.74	25,685,714,790.71	28,254,286,269.79	31,079,714,896.76	34,187,686,386.44
4.	Belanja premi asuransi	177,006,725.00	10%	194,707,397.50	214,178,137.25	235,595,950.98	259,155,546.07	285,071,100.68	313,578,210.75
5.	Belanja Perawatan kendaraan bermotor	1,879,587,888.00	10%	2,067,546,676.80	2,274,301,344.48	2,501,731,478.93	2,751,904,626.82	3,027,095,089.50	3,329,804,598.45
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	316,846,000.00	10%	348,530,600.00	383,383,660.00	421,722,026.00	463,894,228.60	510,283,651.46	561,312,016.61
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,653,921,766.00	10%	1,819,313,942.60	2,001,245,336.86	2,201,369,870.55	2,421,506,857.60	2,663,657,543.36	2,930,023,297.70
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,179,670,000.00	10%	2,397,637,000.00	2,637,400,700.00	2,901,140,770.00	3,191,254,847.00	3,510,380,331.70	3,861,418,364.87
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Belanja pemeliharaan	5,984,137,594.00	10%	6,582,551,353.40	7,240,806,488.74	7,964,887,137.61	8,761,375,851.38	9,637,513,436.51	10,601,264,780.16
11.	Belanja Perawatan Bangunan/Gedung	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Belanja Perawatan Peralatan	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Belanja perawatan jaringan/instalasi	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Belanja Barang Dana BOS	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Belanja Jaminan Sosial	-	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran Daerah</b>	<b>8,350,000,000.00</b>	<b>10%</b>	<b>9,185,000,000.00</b>	<b>10,103,500,000.00</b>	<b>11,113,850,000.00</b>	<b>12,225,235,000.00</b>	<b>13,447,758,500.00</b>	<b>14,792,534,350.00</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,350,000,000.00	10%	3,685,000,000.00	4,053,500,000.00	4,458,850,000.00	4,904,735,000.00	5,395,208,500.00	5,934,729,350.00
3.	Pengeluaran Dana Talangan	5,000,000,000.00	10%	5,500,000,000.00	6,050,000,000.00	6,655,000,000.00	7,320,500,000.00	8,052,550,000.00	8,857,805,000.00



<b>TOTAL (A+B)</b>	395,503,066,233.20	<b>10%</b>	435,053,372,856.52	478,558,710,142.17	526,414,581,156.39	579,056,039,272.03	636,961,643,199.23	700,657,807,519.15
		<b>10%</b>	388,939,882,172.82	427,833,870,390.10	470,617,257,429.11	517,678,983,172.02	569,446,881,489.23	626,391,569,638.15

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015

### Belanja Daerah

Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

#### a. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Yang Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat, serta prioritas utama periode tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini.

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama**  
**Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021**

No.	Uraian	Data tahun dasar (2015)	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>306.510.205.297,00</b>		<b>416.546.527.856,59</b>	<b>437.373.854.249,42</b>	<b>459.242.546.961,89</b>	<b>482.204.674.309,99</b>	<b>506.314.908.025,48</b>	<b>531.630.653.426,76</b>
1.	Gaji dan Tunjangan	257.418.346.951,00	5%	344.464.619.751,59	361.687.850.739,17	379.772.243.276,13	398.760.855.439,93	418.698.898.211,93	439.633.843.122,53
2.	Tambahan penghasilan PNS	45.992.994.500,00	5%	67.965.060.000,00	71.363.313.000,00	74.931.478.650,00	78.678.052.582,50	82.611.955.211,63	86.742.552.972,21
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.096.000.000,00	5%	2.268.200.000,00	2.381.610.000,00	2.500.690.500,00	2.625.725.025,00	2.757.011.276,25	2.894.861.840,06
4.	Insentif pemungutan pajak daerah	927.400.000,00	5%	1.582.300.000,00	1.661.415.000,00	1.744.485.750,00	1.831.710.037,50	1.923.295.539,38	2.019.460.316,34
5.	Insentif pemungutan	75.463.846,00	5%	266.348.105,00	279.665.510,25	293.648.785,76	308.331.225,05	323.747.786,30	339.935.175,62



	retribusi daerah								
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33.300.929.862,00</b>		<b>41.457.562.014,00</b>	<b>43.530.440.114,70</b>	<b>45.706.962.120,44</b>	<b>47.992.310.226,46</b>	<b>50.391.925.737,78</b>	<b>52.911.522.024,67</b>
1.	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	11.916.443.226,00	5%	13.682.789.968,00	14.366.929.466,40	15.085.275.939,72	15.839.539.736,71	16.631.516.723,54	17.463.092.559,72
2.	Belanja jasa kantor	17.448.234.967,00	5%	22.121.456.235,00	23.227.529.046,75	24.388.905.499,09	25.608.350.774,04	26.888.768.312,74	28.233.206.728,38
3.	Belanja sewa rumah/gedung/gudang g/parkir	379.960.000,00	5%	638.050.000,00	669.952.500,00	703.450.125,00	738.622.631,25	775.553.762,81	814.331.450,95
4.	Belanja sewa sarana mobilitas	1.945.465.000,00	5%	2.775.400.000,00	2.914.170.000,00	3.059.878.500,00	3.212.872.425,00	3.373.516.046,25	3.542.191.848,56
5.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1.610.826.669,00	5%	2.239.865.811,00	2.351.859.101,55	2.469.452.056,63	2.592.924.659,46	2.722.570.892,43	2.858.699.437,05
6.	Belanja beasiswa pendidikan PNS	-		-					
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>339.811.135.159,00</b>		<b>458.004.089.870,59</b>	<b>480.904.294.364,12</b>	<b>504.949.509.082,33</b>	<b>530.196.984.536,44</b>	<b>556.706.833.763,26</b>	<b>584.542.175.451,43</b>

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015

### Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2016-2021. Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapannya secara indikatif tersaji pada Tabel 3.19 berikut ini.



**Tabel 3.19**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021**

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendapatan	1.055.603.784.935,16	1.108.383.974.181,92	1.163.803.172.891,01	1.221.993.331.535,56	1.283.092.998.112,34	1.347.247.648.017,96
2.	Pencairan dana cadangan						
3.	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	42.321.143.381,02	41.897.931.947,21	41.478.952.627,74	41.064.163.101,46	40.653.521.470,45	40.246.986.255,74
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah</b>	<b>1.097.924.928.316,18</b>	<b>1.150.281.906.129,13</b>	<b>1.205.282.125.518,75</b>	<b>1.263.057.494.637,02</b>	<b>1.323.746.519.582,79</b>	<b>1.387.494.634.273,70</b>

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.19 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.



### **Kebijakan Alokasi Anggaran**

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam prioritas program/kegiatan. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III, di mana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

#### **Prioritas I**

Dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama.

#### **Prioritas II**

Dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **Prioritas III**

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.



Pengalokasiannya prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada Tabel 3.20 sebagai berikut.

**Tabel 3.20**  
**Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas**  
**Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2016-2021**

No	Jenis dana	Alokasi											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
<b>1.</b>	<b>Prioritas I</b>												
	Belanja tidak langsung		345.758.651.497,59	5	363.046.584.072,47	5	381.198.913.276,09	5	400.258.858.939,90	5	420.271.801.886,89	5	441.285.391.981,24
	Belanja langsung		302.823.417.660,35	5	317.964.588.543,37	5	333.862.817.970,54	5	350.555.958.869,06	5	368.083.756.812,52	5	386.487.944.653,14
<b>2.</b>	<b>Prioritas II</b>		91.001.150.218,51	5	95.551.207.729,44	5	100.328.768.115,91	5	105.345.206.521,70	5	110.612.466.847,79	5	116.143.090.190,18
<b>3.</b>	<b>Prioritas III</b>		354.423.565.558,71	5	372.144.743.836,65	5	390.751.981.028,48	5	410.289.580.079,90	5	430.804.059.083,90	5	452.344.262.038,09
	<b>Total</b>		1.094.006.784.935,16		1.148.707.124.181,92		1.206.142.480.391,01		1.266.449.604.410,56		1.329.772.084.631,09		1.396.260.688.862,65

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jemberana 2015

Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jemberana tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.21 berikut ini.

**Tabel 3.21**  
**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2016-2021**

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	Pendapatan	1.055.603.784.935,16	1.108.383.974.181,92	1.163.803.172.891,01	1.221.993.331.535,56	1.283.092.998.112,34	1.347.247.648.017,96



	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	42.321.143.381,02	41.897.931.947,21	41.478.952.627,74	41.064.163.101,46	40.653.521.470,45	40.246.986.255,74
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
	<b>PRIORITAS I</b>						
a.	Gaji dan Tunjangan	<b>345.758.651.497,59</b>	363.046.584.072,47	381.198.913.276,09	400.258.858.939,90	420.271.801.886,89	441.285.391.981,24
b.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.268.200.000,00	2.381.610.000,00	2.500.690.500,00	2.625.725.025,00	2.757.011.276,25	2.894.861.840,06
c.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.582.300.000,00	1.661.415.000,00	1.744.485.750,00	1.831.710.037,50	1.923.295.539,38	2.019.460.316,34
d.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	266.348.105,00	279.665.510,25	293.648.785,76	308.331.225,05	323.747.786,30	339.935.175,62
	<b>PRIORITAS III</b>						
a.	Tambahan Penghasilan PNS	67.965.060.000,00	71.363.313.000,00	74.931.478.650,00	78.678.052.582,50	82.611.955.211,63	86.742.552.972,21
b.	Belanja Hibah	13.621.044.174,17	14.302.096.382,88	15.017.201.202,02	15.768.061.262,12	16.556.464.325,23	17.384.287.541,49
c.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Masyarakat	2.880.697.500,00	3.024.732.375,00	3.175.968.993,75	3.334.767.443,44	3.501.505.815,61	3.676.581.106,39
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	83.495.698.955,52	87.670.483.903,30	92.054.008.098,46	96.656.708.503,38	101.489.543.928,55	106.564.021.124,98
e.	Belanja Tidak Terduga						
<b>2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						
	<b>PRIORITAS I</b>						
a.	Belanja honorarium pns khusus untuk guru dan tenaga medis	13.682.789.968,00	14.366.929.466,40	15.085.275.939,72	15.839.539.736,71	16.631.516.723,54	17.463.092.559,72
b.	Belanja Jasa Kantor	22.121.456.235,00	23.227.529.046,75	24.388.905.499,09	25.608.350.774,04	26.888.768.312,74	28.233.206.728,38
c.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	638.050.000,00	669.952.500,00	703.450.125,00	738.622.631,25	775.553.762,81	814.331.450,95
d.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.775.400.000,00	2.914.170.000,00	3.059.878.500,00	3.212.872.425,00	3.373.516.046,25	3.542.191.848,56
e.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.239.865.811,00	2.351.859.101,55	2.469.452.056,63	2.592.924.659,46	2.722.570.892,43	2.858.699.437,05
f.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS						
	<b>PRIORITAS II</b>						
a.	Program pencapaian visi dan misi	1.055.603.784.935,16	1.108.383.974.181,92	1.163.803.172.891,01	1.221.993.331.535,56	1.283.092.998.112,34	1.347.247.648.017,96
b.	Program penyelenggaraan urusan lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>						





	Pembentukan dana cadangan						
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.582.706.156,02	4.811.841.463,82	5.052.433.537,01	5.305.055.213,86	5.570.307.974,56	5.848.823.373,28
	Pembayaran Pokok Utang						
	<b>SURPLUS/DEFISIT = A – (B + C)</b>						
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
	Penerimaan pinjaman daerah						
	Penerimaan piutang						
	<b>SILPA</b>						

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.21 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.